

**ANALISIS KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH
DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA
PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI SUMATERA BARAT**

DISERTASI



**PROGRAM DOKTOR STUDI KEBIJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
2026**

HALAMAN PERSYARATAN

**ANALISIS KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PENGURANGAN RISIKO
BENCANA DI SUMATERA BARAT**



**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Doktor Studi Kebijakan pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

**PROGRAM DOKTOR STUDI KEBIJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

ABSTRAK

ANALISIS KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI SUMATERA BARAT

Oleh: Nika Saputra (2230872008)

(Di bawah bimbingan: Dr. Roni Ekha Putera, S.IP., M.PA., Dr. Aidinil Zetra, MA., dan
Dr. Azwar, M.Si.)

Penelitian ini menganalisis model peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengurangan risiko bencana (PRB) di Sumatera Barat. Penelitian berangkat dari paradoks kapasitas kelembagaan, yaitu kondisi ketika regulasi, organisasi, dokumen perencanaan, teknologi, pelatihan, forum koordinasi, dan dukungan anggaran telah tersedia, tetapi kapasitas formal tersebut belum selalu bertransformasi menjadi kinerja PRB yang optimal. Penelitian menggunakan desain *mixed methods sequential explanatory*. Tahap kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap 311 responden pada Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam serta dianalisis menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Tahap kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen kelembagaan, dan pembacaan konteks lapangan untuk menjelaskan mekanisme, variasi, dan anomali temuan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas SDM, Struktur dan Tata Kelola, serta Teknologi dan Inovasi berpengaruh positif terhadap Kinerja PRB, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Kinerja Organisasi dan Kolaborasi Multipihak sebagai mediator parsial. Kinerja Organisasi berfungsi sebagai mekanisme konversi internal, sedangkan Kolaborasi Multipihak berfungsi sebagai mekanisme perluasan eksternal. Jalur Teknologi dan Inovasi menuju Kolaborasi Multipihak merupakan jalur kapasitas menuju mediator yang paling kuat, sedangkan Dukungan Politik dan Anggaran memberikan pengaruh langsung terbesar terhadap Kinerja PRB. Namun, efek moderasi Dukungan Politik dan Anggaran pada hubungan Kinerja Organisasi terhadap Kinerja PRB tidak signifikan. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa dukungan politik-fiskal bekerja sebagai *enabling condition* yang menyediakan legitimasi, prioritas, dan sumber daya, tetapi belum otomatis menjadi *amplifying condition* apabila tidak dilembagakan ke dalam SOP, pembiayaan preventif, pemeliharaan teknologi, *monitoring*, *after-action review*, dan akuntabilitas tindak lanjut. Variasi antar lokus menunjukkan bahwa Kota Padang mengaksentuasikan kecepatan informasi dan integrasi komando perkotaan, Padang Pariaman mengaksentuasikan sinkronisasi jejaring pesisir-hulu, sedangkan Agam mengaksentuasikan jejaring nagari dan *last-mile delivery*. Penelitian menghasilkan Model Transformasi Kapasitas Kelembagaan PRB Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa kapasitas formal perlu diaktifkan, dikonversi melalui proses organisasi, diperluas melalui jejaring kolaboratif, serta dilembagakan melalui implementasi yang adaptif dan berorientasi risiko. Model tersebut memiliki transferabilitas analitis secara terbatas dan tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara seragam pada seluruh daerah.

Kata kunci: kapasitas kelembagaan; pengurangan risiko bencana; kinerja organisasi; kolaborasi multipihak; dukungan politik dan anggaran

ABSTRACT

ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONAL CAPACITY TO IMPROVE DISASTER RISK REDUCTION PERFORMANCE IN WEST SUMATRA

by: Nika Saputra (2230872008)

(Supervised by: Dr. Roni Ekha Putera, S.IP., M.PA., Dr. Aidinil Zetra, MA., dan Dr. Azwar, M.Si.)

This study analyzes a model for strengthening local government institutional capacity to improve disaster risk reduction (DRR) performance in West Sumatra. It addresses the institutional capacity paradox, a condition in which regulations, organizations, planning documents, technologies, training programs, coordination forums, and budgetary support are available but do not always translate into optimal DRR performance. The study employed a sequential explanatory mixed-methods design. The quantitative phase involved a survey of 311 respondents from Padang City, Padang Pariaman Regency, and Agam Regency and was analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling. The qualitative phase used in-depth interviews, institutional document review, and field-context analysis to explain the mechanisms, variations, and anomalies identified in the quantitative findings. The results show that Human Resource Capacity, Structure and Governance, and Technology and Innovation positively affect DRR Performance, both directly and indirectly through Organizational Performance and Multi-stakeholder Collaboration as partial mediators. Organizational Performance functions as an internal conversion mechanism, while Multi-stakeholder Collaboration functions as an external capacity-extension mechanism. The Technology and Innovation–Multi-stakeholder Collaboration path is the strongest capacity-to-mediator relationship, whereas Political and Budgetary Support has the largest direct effect on DRR Performance. However, the moderating effect of Political and Budgetary Support on the Organizational Performance–DRR Performance relationship is not significant. The qualitative findings indicate that political-fiscal support operates as an enabling condition that provides legitimacy, priority, and resources, but does not automatically become an amplifying condition unless it is institutionalized through SOPs, preventive financing, technology maintenance, monitoring, after-action review, and follow-up accountability. Cross-site variation shows that Padang emphasizes rapid information and urban command integration, Padang Pariaman emphasizes coastal–upstream network synchronization, and Agam emphasizes nagari-based networks and last-mile delivery. The study develops a Local Government Institutional Capacity Transformation Model for DRR, emphasizing that formal capacity must be activated, converted through organizational processes, extended through collaborative networks, and institutionalized through adaptive and risk-informed implementation. The model has limited analytical transferability and is not intended to be applied uniformly across all regions.

Keyword: *institutional capacity; disaster risk reduction; organizational performance; multi-stakeholder collaboration; political and budgetary support*